

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan mendapat sorotan dari tingkat internasional dan termasuk ke dalam salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 yakni upaya demi menghapus kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, memastikan gizi yang optimal, dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan. Isu ketahanan pangan saat ini menjadi perhatian global yang sangat penting, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Konsep ini memuat kemampuan guna menjamin tersedianya pangan yang cukup, aman dikonsumsi, dan bernilai gizi bagi seluruh populasi. Ketahanan pangan fokusnya tidak sebatas pada jumlah, melainkan juga pada mutu dari nutrisi yang ada. Aksesibilitas terhadap pangan menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa seluruh penduduk mendapatkan makanan dengan mudah tanpa adanya hambatan. Untuk mencapai ketahanan pangan, suatu negara perlu terlebih dahulu mengupayakan swasembada pangan. Meski begitu, impor pangan dapat dijadikan opsi strategis ketika pemerintah menilai bahwa harga maupun ketersediaan pangan di pasar berada pada situasi yang mengkhawatirkan (Salasa, 2021). Dengan hal ini, strategi peningkatan ketahanan pangan dapat berimbas pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat menyeluruh. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika kebutuhan pangan terpenuhi mulai dari tingkatan nasional sampai dengan perorangan, yang ditunjukkan dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan kualitasnya, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, dan mudah diakses serta tidak berkontradiksi dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif

secara kontinu. Undang-undang tersebut mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah pangan pokok yang menjadi konsumsi utama sehari-hari yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal di masing-masing daerah. Salah satu komoditas pangan pokok yakni komoditas beras yang menempati peranan inti untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat meningkatkan permintaan pangan, terutama di negara-negara berkembang. Adapun tantangan lainnya yaitu seperti penurunan luas lahan pertanian dan meningkatnya biaya produksi tetap menjadi hambatan. Dalam perwujudan ketahanan pangan nasional, perlu memperhitungkan beberapa hambatan dan gangguan yang dapat mengkhawatirkan stabilitas nasional dari faktor lingkungan maupun social-ekonomi, seperti kondisi iklim atau cuaca secara relevan dapat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional terutama proses produksi yang memiliki dampak pada kuantitas dan kualitas pangan (Rhofita, 2022). Untuk itu, pemerintah terus berusaha memperkuat ketahanan pangan masyarakat, baik melalui peningkatan produksi domestik maupun lewat impor sebagai pelengkap. Upaya ini semakin krusial, mengingat jumlah penduduk yang sangat padat serta wilayah geografis yang membentang. Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh iklim juga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dalam negeri. Jika praktik produksi yang sensitif akan perubahan lingkungan serta tidak diimbangi dengan regulasi pangan yang efektif, maka dampaknya bisa merugikan bagi kedua pihak yakni produsen dan konsumen. Karakteristik komoditas pangan yang mudah mengalami kerusakan, keterbatasan lahan produksi, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian serta lemahnya penanganan

panen dan pasca panen menuntut intervensi dari pemerintah dalam bentuk perumusan kebijakan guna ketahanan pangan berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2023

Hasil analisis *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rentan (Prioritas 1 hingga 3) menunjukkan kemunduran dari 14,4% pada tahun 2022 menjadi 13,23% di tahun 2023 (BAPANAS, 2024). Hasil analisis tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap jumlah kabupaten/kota yang tergolong rentan pangan. Penurunan tersebut dapat didefinisikan sebagai pertanda perbaikan dalam ketahanan pangan di beberapa daerah, yang bisa saja dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya pangan. Namun, masih tersisa 68 kabupaten/kota berada dalam kategori rentan, hal tersebut menunjukkan perlunya perhatian untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan.

Beras termasuk salah satu makanan pokok di Indonesia, wajar saja jika Indonesia dijuluki sebagai negara agraris yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman padi (*Oryza sativa*) yang menghasilkan beras dapat

ditanam pada berbagai kondisi iklim dan jenis tanah di Indonesia. Beras juga memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan sekaligus perekonomian nasional. Dari sisi konsumsi, beras menyumbang lebih dari 50% kebutuhan kalori harian penduduk Indonesia, sehingga ketersediaannya berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat. Peran kultur pangan melalui tradisi makan nasi juga menjadikan ketergantungan terhadap beras sulit diubah. Dari sisi ekonomi, beras menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petani kecil, sekaligus komoditas penting yang fluktuasi harganya berdampak pada inflasi, daya beli masyarakat, neraca perdagangan, hingga stabilitas politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa beras tidak hanya penting sebagai makanan pokok, tetapi juga sebagai penentu kesejahteraan petani, angka kemiskinan, dan stabilitas nasional. Dengan meningkatnya populasi global, proyeksi permintaan terhadap beras diperkirakan akan terus meningkat. Adapun konsumsi beras di Indonesia cenderung meningkat per tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Indonesia bahkan berada dalam jajaran negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi secara global. Hal ini akan menjadi masalah bagi penduduk Indonesia jika sangat bergantung pada beras apabila beras tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup (Sutoni *et al.*, 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data produksi beras Indonesia cenderung berfluktuasi akibat berbagai faktor, seperti krisis iklim, penyusutan lahan sawah, keadaan tanah yang menurun, serta terbatasnya akses terhadap irigasi. Produksi beras di Indonesia tahun 2023 sebesar 31,10 juta ton. Angka tersebut didapatkan dari transformasi produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut terdapat penurunan 1,4% dibandingkan tahun 2022,

serta menjadi rekor terendah sejak tahun 2018. Penurunan produksi padi dan luas panen tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino. Menurut Herwanto *et al.* (2019), perolehan panen komoditas padi memiliki pengaruh dalam memenuhi kebutuhan pokok beras, sebab kebutuhan beras dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Agar dapat menghasilkan panen yang lebih, diperlukan beberapa informasi seperti luas lahan, jumlah bibit yang akan di tanam, dan pupuk yang digunakan sebagai penunjang kebutuhan tanaman padi. Luas lahan sebagai tempat untuk menanam padi memiliki pengaruh besar terhadap hasil panen. Menurut data sensus BPS (2023), di Indonesia sekitar 27,8 juta petani yang mengelola lahan pertanian, dengan 17,2 juta di antaranya tergolong sebagai petani gurem.

Konsumsi beras di Indonesia dalam periode enam tahun terakhir berindikasi meningkat, hal ini terbukti dari data statistik konsumsi beras pada kurun waktu tersebut. Konsumsi beras yang tinggi dapat disinyalir melalui konsumsi rumah tangga, rumah makan, serta industri yang ada di Indonesia yang dirangkul setiap tahunnya dalam setiap provinsi. Meskipun tidak merata, akumulasi konsumsi beras secara rata-rata masih terbilang tinggi, hal ini memicu produksi beras untuk harus mengimbangi permintaan dari beras itu sendiri. Berikut data komparasi jumlah produksi dan konsumsi beras selama tahun 2018-2023:

Tabel 1. 1 Komparasi Jumlah Produksi dan Konsumsi Beras Tahun 2018-2023

<b>Tahun</b>	<b>Produksi (ton)</b>	<b>Konsumsi (ton)</b>	<b>Produksi-Konsumsi (ton)</b>
2018	33.942.865	29.570.000	4.372.865
2019	31.313.034	28.690.000	2.623.034
2020	31.334.497	29.370.000	1.964.497
2021	31.356.017	30.040.000	1.316.017
2022	31.540.522	30.200.000	1.340.522
2023	31.101.285	35.300.000	-4.198.715

Sumber: (Data diolah, 2024)

Konsumsi beras yang tinggi dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor lonjakan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan nasi sebagai makanan pokok mereka. Jumlah penduduk yang semakin tinggi memberikan artian bahwa jumlah individu yang harus mengonsumsi beras bertambah, sehingga permintaan akan kebutuhan konsumsi beras juga meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pada akhir tahun 2023, Indonesia memiliki penduduk sebesar 293.026.225 jiwa yang tersebar di setiap provinsinya. Data jumlah penduduk pada masing-masing provinsi berada pada Lampiran 4.

Untuk menutup selisih antara produksi dan kebutuhan konsumsi, impor beras menjadi langkah penting guna mencegah kelangkaan yang bisa menyebabkan lonjakan harga. Mengingat hampir seluruh masyarakat Indonesia menjadikan beras makanan pokok mereka, hal ini membuat Indonesia tercatat sebagai bagian dari negara dengan konsumsi beras tertinggi secara global. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia, meskipun dikenal sebagai produsen beras, masih mengandalkan impor dari negara lain. Tak bisa disangkal, penambahan jumlah penduduk terus meningkat serta tingginya konsumsi menjadi faktor utama yang mendorong besarnya volume impor beras nasional. Impor beras dari negara lain masih dibutuhkan terlepas dari defisit maupun surplus produksi beras dalam negeri, hal ini dilakukan sebagai upaya stabilisasi harga nasional ataupun sebagai upaya menjaga stok cadangan beras nasional. Menurut Dewi (2018), dalam upaya mempertahankan kualitas dan kuantitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga, pemerintah mengerahkan Perum Bulog untuk melakukan distribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Raskin. Jika dalam proses

distribusi terjadi defisit stok yang tidak terpenuhi oleh produksi domestik, Perum Bulog diberikan wewenang untuk dapat melakukan impor guna menjamin cadangan beras nasional dapat tercukupi. Jika sepenuhnya bergantung pada produksi beras dalam negeri, kebutuhan nasional belum dapat terpenuhi secara optimal (Hasanah, 2022). Maka dari itu, impor beras merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan antisipasi kekurangan stok beras dalam negeri. Berikut data jumlah impor beras Indonesia tahun 2018-2023:

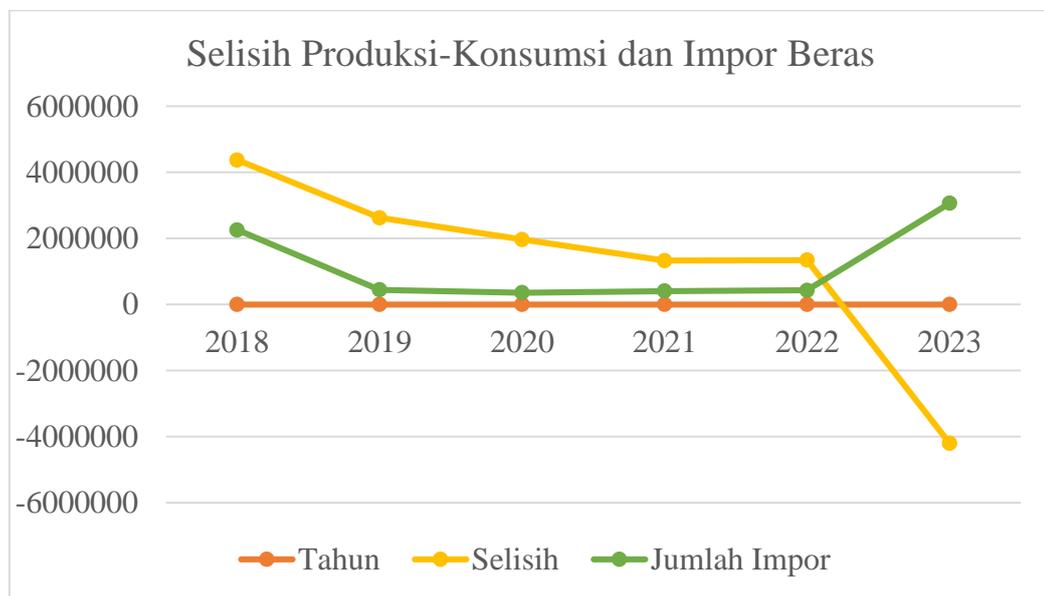
Tabel 1. 2 Impor Beras Indonesia Tahun 2018-2023

<b>Impor Beras (ton)</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Total</b>
2018	2.253.824
2019	444.509
2020	356.286
2021	407.741
2022	429.207
2023	3.062.858

Sumber: (BPS, 2023)

Tabel diatas memberikan data impor beras dari negara asal utama dalam enam tahun terakhir (2018-2023), impor beras Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, impor beras mencapai angka tertinggi sebesar 2,25 juta ton. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, impor beras mengalami penurunan drastis, dengan angka terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 356,29 ribu ton. Setelah itu, impor mulai meningkat secara bertahap pada 2021 dan 2022, meskipun masih dalam jumlah yang relatif rendah dibandingkan tahun 2018. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam dengan impor mencapai 3,06 juta ton, menjadikannya angka tertinggi dalam periode yang diamati. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh keputusan pemerintah. Menurut BAPANAS 2024, dari pemerintah diteruskan kepada Badan Pangan Nasional memberikan mandat kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak Rp 2.000.000 ton,

dengan tambahan Rp 1.500.000 ton tahun 2023. Arief Prasetyo Adi sebagai kepala Badan Pangan Nasional, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan pilihan sulit yang harus diambil dalam menghadapi penurunan produksi padi nasional yang dipengaruhi oleh fenomena iklim El Niño. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan kebutuhan beras dalam negeri, kebijakan perdagangan, serta ketersediaan beras dari negara-negara pengekspor. Berikut grafik perbandingan kekurangan beras yang didapat dari pengurangan jumlah konsumsi dan produksi beras dengan impor beras:



Gambar 1. 2 Selisih Produksi-Konsumsi dan Impor Beras

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Eskpor dan Impor Beras pada Pasal 5 yang berbunyi bahwa “Impor beras hanya dapat dilakukan dengan tujuan keperluan umum, hibah, dan keperluan lainnya”. Adanya fluktuasi akibat harga beras di pasaran dimana permintaan beras mengalami penurunan menyebabkan negara harus melakukan impor beras, hal ini sesuai dengan hukum permintaan *ceteris paribus* (Paipan dan Abrar, 2020). Impor beras merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi nasional.

Kebijakan ini sebagai wujud untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan beras tercukupi bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah pada Rumus Perhitungan Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang berbunyi “Cadangan beras nasional (CBN) adalah persediaan beras yang jumlahnya 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan beras tersebut dibagi menjadi: 11,5% di masyarakat, 8% dikuasai oleh pemerintah pusat, 0,5% di pemerintah daerah”. Adapun data cadangan beras nasional dari tahun 2018-2023:

Tabel 1. 3 Cadangan Beras Nasional Tahun 2018-2023

<b>Tahun</b>	<b>Cadangan Beras (Juta Ton)</b>	<b>Keterangan</b>
2018	1,67	Stok beras pemerintah yang cukup stabil
2019	1,45	Penurunan stok akibat penurunan produksi
2020	1,57	Pemulihan stok setelah penurunan sebelumnya
2021	1,80	Peningkatan stok beras untuk memenuhi kebutuhan
2022	1,70	Stabilitas stok meskipun ada tantangan produksi
2023	1,39	Penurunan stok akibat dampak perubahan iklim dan peningkatan konsumsi.

Sumber: (Indonesia.go.id, 2021 dan BAPANAS, 2024)

Selama periode ini, produksi beras nasional mengalami perubahan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan peralihan lahan pertanian yang dirupakan sebagai lahan untuk kepentingan non-pertanian. Strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional (NFA) termasuk meningkatkan penyerapan hasil panen domestik dan melakukan impor saat diperlukan untuk menjaga ketersediaan beras stabil. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk menjaga stok beras nasional, faktor lingkungan dan meningkatnya permintaan domestik masih menjadi hambatan yang memengaruhi stabilitas ketersediaan beras nasional.

Menekan kebijakan impor tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kesejahteraan kepada petani yakni dengan meninggikan Nilai Tukar Petani (NTP) dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurut Hutabarat *et al.* (2024), untuk mengevaluasi dampak pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan suatu instrumen pengukuran yang mampu menilai perkembangan tingkat kesejahteraan tersebut. Salah satu indikator yang umum diimplementasikan dalam mengukur dan merepresentasikan kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani membandingkan komparasi harga produk yang dijual petani dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi maupun konsumsi. Ketika NTP tinggi, maka petani dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan insentif untuk meningkatkan produksi, sehingga mampu memproduksi pangan yang berkualitas. Begitupun sebaliknya, jika NTP rendah maka dapat mengurangi kemampuan petani untuk berproduksi, sehingga berpotensi mengganggu ketersediaan pangan nasional. Jumlah rerata presentase NTP Indonesia di tahun 2023 sejumlah 4383,05%. Akan tetapi, tingkat kesejahteraan petani yang direpresentasikan melalui NTP tersebut dapat dilihat melalui besarnya presentase NTP pada masing-masing provinsi. Sebab, akumulasi NTP setiap provinsi akan dapat menggambarkan kondisi daerahnya masing-masing. NTP per provinsi disajikan pada Lampiran 4.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, Indonesia memiliki tingkat kemandirian pangan berbeda terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi merupakan indikator penting yang dapat tercerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah per kapita. Menurut Susila dan Pradhani (2022), PDRB per kapita merupakan istilah dari nilai PDRB

dibagi dengan total PDRB suatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Tingkat PDRB per kapita mengindikasikan kemampuan ekonomi setiap daerah. Jika PDRB per kapita di suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut dikategorikan mampu secara ekonomi, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakatnya untuk mengakases serta menyediakan kebutuhan pokok termasuk pangan. Daerah tersebut cenderung memiliki kemampuan lebih baik untuk berinvestasi dalam infrastruktur pendukung ketahanan pangan seperti irigasi, teknologi pertanian, dan fasilitas lainnya.

Menurut Susila dan Pradhani (2022), PDRB adalah nilai total dari semua barang dan jasa dari hasil produsen di suatu daerah dalam kurun periode tertentu. Terdapat 12 sektor yang terlibat dalam penyusunan PDRB yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Selain itu, terdapat sektor listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan; transportasi dan komunikasi; jasa keuangan; *real estat* dan jasa perusahaan; dan berbagai jasa lainnya. Selain itu, tingkat pendapatan per kapita masyarakat tersebut dapat meningkatkan daya beli terhadap pangan yang berkualitas sehingga membantu mengurangi kerentanan terhadap gizi buruk. Oleh sebab itu, PDRB per kapita dapat mempengaruhi kemampuan suatu wilayah dalam menjaga ketahanan pangan, baik dari segi ketersediaan, keterjangkauan, maupun stabilitas distribusi lainnya. Untuk mengukur hal tersebut, dapat diperhatikan dengan melihat masing-masing provinsi di Indonesia. data PDRB per kapita pada masing-masing provinsi tahun 2023 terdapat di Lampiran 4.

Berdasarkan uraian beberapa permasalahan atas lonjakan konsumsi beras dan impor beras, pemerintah menekankan pentingnya kebijakan untuk menstabilkan

kebutuhan beras dan mencapai swasembada pangan. Menurut Bapanas (2024), Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program swasembada pangan sesuai amanat Perpres 66 Tahun 2021. Program ini mencakup strategi hulu-hilir, seperti penyerapan hasil panen melalui kemitraan *closed loop*, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penyesuaian harga pasar yang berlaku bagi produsen dan konsumen. Selain itu, Kepala Bapanas menekankan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), serta optimalisasi lumbung pangan untuk mendukung logistik antardaerah. Peningkatan produksi pangan diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, menstabilkan pasokan dan harga, serta mengendalikan inflasi. Hal ini juga berperan pada peringkasan ekonomi pada sektor produksi, pengolahan, dan perdagangan. Dilandasi permasalahan diatas maka, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam negeri menjadi kunci swasembada pangan, didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat swasembada beras pada masing-masing provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan jumlah impor beras selama 6 tahun (2018-2023)?
3. Bagaimana tingkat ketahanan pangan selama 6 tahun (2018-2023)?
4. Bagaimana hubungan antara tingkat swasembada beras dan tingkat ketahanan pangan nasional?

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional?

### **1.3. Tujuan**

Mendasari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat swasembada beras pada masing-masing provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perkembangan jumlah impor beras selama 6 tahun (2018-2023).
3. Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan selama 6 tahun (2018-2023).
4. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat swasembada beras dan tingkat ketahanan pangan nasional.
5. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

### **1.4. Manfaat**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka berkontribusi secara manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan, yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung, meliputi:

#### **1.4.1. Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa dapat menghubungkan pemahaman teoritis dari perkuliahan dengan praktik serta kondisi yang terus berubah di lapangan.
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan selama studi guna mengkaji permasalahan riil dan merumuskan solusi.

#### **1.4.2. Bagi Perguruan Tinggi**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat yang dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi dasar untuk bahan pengetahuan bagi penelitian yang sejenis di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

#### **1.4.3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai masukan dan pertimbangan yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan strategi dan menetapkan kebijakan di masa mendatang, terutama dalam swasembada beras dan ketahanan pangan di Indonesia.